

**PSEUDO GOVERNMENT THE AID OF EXERTION GROUP
KELUARGA HARAPAN PROGRAM**

Buchory, Achmad

Abstract

Social aid Kelompok Usaha Bersama (KUBE) and Family Prospect Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) are 2 new programs by Social Ministry 2016 in sub-district of Jaten. The purpose of the Social Ministry as the main stakeholder in conducting this program is making each villages to be independence in solving the social problem faced. Pseudo government is one of aspect which makes KUBE PKH program being not optimal in developing the DSM in Jaten. This research aims to investigate the pseudo government phenomena that happened in social aid of KUBE PKH in developing DSM in Jaten. This research used qualitative method by phenomenology approach. Deep Interview, Observation, Focus Group Discussion (FGD), and Document Study are used to collect the data. The findings data in further are described, discussed using theories, and interpreted.

The finding of this research is pseudo government practice in sub-district of Jaten give bad impact to the purpose of KUBE which makes the KUBE does not work well to make the villages be independence. pseudo government also gives bad impact to advisors of KUBE which make them really hard to manage the members of KUBE to develop the economy, Social, and organization. The real bad impact is that, make the independence of KUBE is really hard to achieve. Even though, not all the KUBE in Jaten follow the pseudo government. Some of them reject it collectively by straighten their financial capital. This rejection is the process of heterodoxa which is going to successful the KUBE also the village. The rejection of KUBE supported by the main stakeholder by giving supporting financial in conducting the aid of KUBE to be developed become DSM.

Keywords: Pseudo Government, Social Area, financial capital, habitus, endeavoring, productive economy exertion, Desa Sejahtera Mandiri

PSEUDO GOVERNMENT PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Achmad Buchory
(Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta)
syahdan2007@gmail.com

Abstrak

Bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program baru yang digulirkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 di Kecamatan Jaten. Kementerian Sosial selaku *stakeholder* utama menggulirkan program ini dalam upaya untuk memandirikan desa dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pengguliran bantuan ini di Kecamatan Jaten ternyata tidak dilepaskan adanya pengaruh *pseudo government* yang mempengaruhi keoptimalan pelaksanaan pemberdayaan KUBE PKH untuk membentuk DSM di Kecamatan Jaten. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena *pseudo government* yang terjadi pada pengguliran bantuan sosial KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkan dengan teori, dan diinterpretasikan.

Temuan pada penelitian bahwa praktik *pseudo government* yang terjadi di Kecamatan Jaten membawa pengaruh pada tujuan kemandirian dari KUBE maupun desa tidak terlaksana secara maksimal. Proses tersebut juga membawa pengaruh pula terhadap praktik pemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping KUBE, dimana mereka kesulitan untuk mengatur anggota KUBE untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lembaganya. Akibatnya kemandirian dari KUBE tersebut sulit diwujudkan. Walaupun demikian, tidak semua KUBE yang berada di Kecamatan Jaten patuh dengan *pseudo government*. Ada di antara mereka yang melakukan perlawanan secara kolektif dengan memperkuat modal-modal yang dimilikinya. Perlawanan ini merupakan proses *heterodoxa* yang bertujuan untuk menciptakan keberhasilan program yaitu memandirikan KUBE dan desa penerima bantuan. Pola perlawanan kolektif yang dilakukan KUBE didukung oleh *stakeholder* utama dengan memberikan penguatan modal-modal yang dimiliki dalam melaksanakan pemberdayaan KUBE untuk mengembangkan menjadi DSM.

Kata Kunci: *Pseudo Government*, Arena Sosial, Modal, Habitus, Pemberdayaan, Usaha Ekonomi Produktif, Desa Sejahtera Mandiri

A. Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah multi dimensional karena menyangkut banyak aspek dan faktor baik faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik disamping jumlahnya masih cukup besar dan sebarannya luas. Dokumen pengurangan kemiskinan secara global, *Millenium Development Goals* (MDGs), mematok tahun 2015 sebagai batas waktu pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang dicita-citakan. Akan tetapi usaha

pembangunan tersebut melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum mampu memenuhi target penurunan angka kemiskinan menjadi 8-10 %.

Berdasarkan data tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 27,73 juta jiwa (10,96 %) dari jumlah tersebut yang tinggal diperkotaan 8,16 % dan diperdesaan 13,76 %. Berbagai

program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk penanganan kemiskinan, namun masih terjadi perbedaan secara signifikan antara target yang ingin dicapai dengan realisasi. Angka kemiskinan tetap tinggi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Pemerintah menargetkan kemiskinan mengalami penurunan hingga menjadi 7-8% diakhir RPJMN 2019. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah upaya strategi yang mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mensinergikan berbagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial ke dalam melibatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif.

Salah satu Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang memiliki potensi dalam mensinergikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin (KM). Sebagai imbalannya keluarga miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan (Pedoman Umum PKH, 2009). Program ini telah digulirkan sejak tahun 2007 sebagai wujud untuk memenuhi target *Millenium Development Goals* (MDGs) yaitu angka kemiskinan berkisar antara 8-10% (Marwan Jaf'ar, "Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan, hal. 3: 2015). Program ini dikawal oleh pendamping yang direkrut oleh Kementerian Sosial untuk memberikan pendampingan sosial

secara intens dan komperhensif kepada keluarga miskin penerima bantuan agar penggunaan dana bantuan tersebut tepat sasaran dan sangat produktif. Sedangkan program KUBE/UEP merupakan program pemberdayaan sosial yang digulirkan oleh direktorat fakir miskin yang bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan di kalangan keluarga miskin sehingga modal yang digulirkan dapat berkembang dan memberikan manfaat peningkatan pendapatan keluarga. Program KUBE memiliki ciri khas untuk mengembangkan bantuan finansial dari Kementerian Sosial.

Pelaksanaan PKH dan KUBE yang sudah memasuki tahun ke 8 ini telah memunculkan pola-pola fenomena baru dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini telah dapat membentuk komunitas-komunitas keluarga sangat miskin di masyarakat untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah sosial yang mereka alami. Mereka terbentuk atas prakasa dari pendamping PKH sebagai upaya dalam memudahkan melaksanakan kegiatan validasi data dan pencairan dana bantuan PKH. Dengan dibentuknya kelompok tersebut maka akan memudahkan para pendamping PKH dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan sosial kepada para peserta keluarga sangat miskin penerima bantuan PKH. Skema program bantuan yang berbasiskan pendampingan kelompok inilah diharapkan akan menciptakan suatu bentuk kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang membelenggu masyarakat. Kelompok anggota PKH dibentuk atas dasar kedekatan lokasi tempat tinggal dan juga dengan susunan anggota yang bervariasi dari segi umur maupun tingkat pendidikan. Dengan demikian kelompok ini akan membangun kesolidan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan PKH

serta diharapkan mampu membangun Desa Sejahtera Mandiri (DSM) (Laporan Evaluasi PKH Tahun 2015: Hal. 2-3).

Menguatnya relasi sosial dan ikatan sosial dalam memunculkan Usaha Ekonomi Produktif tidak lepas dari peran pendamping PKH yang menjadi individual aktor yang menciptakan peluang untuk memanfaatkan sumberdaya (*resource*) yang terendap dalam relasi-relasi sosial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau manfaat sosial. Dengan demikian apabila individual aktor dalam posisi pasif atau tidak aktif menjalin relasi dengan aktor-aktor lain maka potensi investasi sosial yang terendap pada kelompoknya sukar diidentifikasi (Prof. Sunyoto Usman, "Pengembangan Masyarakat Berbasis Modal Sosial", 2013: www.uny.ac.id). Dengan demikian potensi investasi sosial yang teridentifikasi melalui proses interaksi sosial dalam bentuk praktik sosial akan dapat menciptakan sebuah transformasi sosial di masyarakat dalam membentuk desa sejahtera mandiri.

Desa Sejahtera Mandiri adalah desa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya, memenuhi hak dasar bagi warganya, melindungi warganya dari berbagai resiko sosial dan ekonomi yang dirasakan, memelihara kearifan lokal, mengendalikan konflik sosial yang terjadi di lingkungannya, dan menjadi bantalan sosial bagi warganya yang mengalami berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh potensi dan sumber yang dimiliki (Pedoman Teknis Desa Sejahtera Mandiri, Kementerian Sosial, 2016: Hal 15). Model pengembangan desa sejahtera mandiri berdasarkan pendekatan kawasan terpadu atau ekologis. Karakteristik utama dari Desa Sejahtera Mandiri adalah proses transformasi sistem lingkungan yang menjamin perubahan tatanan sosial

ekonomi masyarakat secara komperhensif dengan meletakkan masyarakat sebagai *entrepreneur*. Transformasi sosial terjadi karena unsur energi sosial yang saling bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, termasuk jaringan sosial pendukungnya.

Berangkat dari latar belakang ini, penelitian ini akan melihat aspek sosiologis dari pelaksanaan PKH dalam mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri melalui KUBE di Kecamatan Jaten. Proses pembentukan desa sejahtera mandiri ini tidak lepas dari pola praktik sosial dalam bentuk mobilisasi secara sinergis antara aktor-aktor sosial seperti Stakeholder kunci (pendamping dan kelompok UEP), Stake Holder Utama (pemerintah) dan Stakeholder Pendukung (dunia usaha dan lembaga sosial desa) yang menjadi modal sosial yang tangguh. Modal sosial yang dimaksud antara lain komitmen dan tanggung jawab bersama yang dielaborasi ke dalam hubungan kolaborasi, koordinasi, kooperasi, dan harmonisasi antar aktor. Keterkaitan hubungan ini merupakan kekuatan mendasar dalam memperkokoh sinergitas Desa Sejahtera Mandiri. Dengan kata lain, modal sosial adalah salah satu nilai dasar yang jika dikelola mampu menjadi energi sosial yang sangat kuat untuk mendukung penerapan Desa Sejahtera Mandiri.

Proses pembentukan Desa Sejahtera Mandiri dari kelompok masyarakat binaan PKH juga memerlukan modal-modal lain sebagai pendukung untuk memperkuat eksistensi pelayanan kesejahteraan sosial. Dukungan modal-modal tersebut bisa berasal dari modal finansial, modal budaya, modal simbolik, bahkan sampai modal politik. Modal-modal tersebut menjadi dasar terjadinya praktik *pseudo government* saat pengguliran bantuan berlangsung. Seperti yang terjadi di Kecamatan Jaten bahwa praktik *pseudo*

government dalam pengguliran bantuan pemberdayaan oleh stakeholder utama malah dilakukan oleh elit-elit desa yang notabenehnya bukan bagian dari struktur program. Para elit-elit tersebut secara cerdas memanfaatkan modal simbolik dan modal politiknya yang kuat untuk mempengaruhi dan mengendalikan proses pengguliran bantuan sosial di masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Koordinasi teknis pelaksanaan PKH pada tahun 2012 di Kecamatan Jaten, Kabupaten Sragen. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Jaten sampai saat ini berjalan sangat positif dimana banyak terjadi peningkatan dari berbagai aspek kesejahteraan pada penerima manfaat. Indikator peningkatan kesejahteraan tersebut yaitu bertambahnya taraf pendapatan keluarga yang dapat menyokong kebutuhan keluarga miskin penerima bantuan PKH. Bertambahnya pendapatan tersebut juga dikarena terbentuknya beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2013 dari kelompok-kelompok Keluarga Miskin yang diprakarsai oleh stakeholder kunci yaitu para pendamping sosial di Kecamatan Jaten. KUBE yang dibentuk secara mandiri ini menjadi alasan pemerintah untuk menggulirkan dana bantuan sosial KUBE sebagai penguat modal finansial pada tahun 2014. Pengguliran bantuan ini diharapkan agar KUBE-KUBE yang sudah terbentuk semakin mampu mengembangkan usahanya dan nantinya menjadi embrio pelopor pembentukan Desa Sejahtera Mandiri di Kecamatan Jaten. Proses pengguliran bantuan inilah telah memicu adanya praktik *pseudo government* pada pelaksanaan programnya sehingga memunculkan upaya untuk memanfaatkan bantuan tersebut untuk mempertahankan kekuasaan politis oleh

para elit-elit baik di kabupaten maupun di desa.

Penelitian ini akan melihat bagaimana proses praktik *pseudo government* pemberdayaan dalam pembentukan KUBE dari kelompok keluarga miskin binaan PKH. Petunjuk teknis yang disusun oleh stakeholder utama dalam program KUBE telah merepresentasikan model pemberdayaan sosial yang bersifat *bottom up*. Petunjuk teknis juga memberikan kesempatan bagi stakeholder pendukung untuk memberikan support terhadap KUBE agar bisa menjalankan usaha yang sudah ditentukan. Dengan konsep demikian maka program KUBE yang digulirkan kepada kelompok keluarga miskin akan bisa berhasil untuk menciptakan kesejahteraan bagi penerima manfaat tersebut. Peran stakeholder kunci menjadi sangat besar karena harus memberikan pendampingan dan menerapkan strategi pemberdayaan yang tepat agar program ini terus terkawal dan tidak menyimpang dari petunjuk teknis yang disusun oleh stakeholder utama. Pada pelaksanaan di Kecamatan Jaten banyak ditemukan penyimpangan terhadap petunjuk teknis ini. Efek dari *pseudo government* secara domino telah membawa praktik-praktik yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari stakeholder utama. Akibatnya banyak dampak yang signifikan terhadap hasil yang diraih dari pemberdayaan KUBE PKH di Kecamatan Jaten.

Dinamika di arena sosial program KUBE juga menjadi kajian utama dari penelitian ini. Adanya praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh para aktor-aktor di luar *stakeholder* menjadi temuan awal yang akan menjadi suatu permasalahan program yang akan digali dalam penelitian. Praktik *pseudo government* yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi kuasa dari segelintir aktor kepentingan

yang masuk dalam *stakeholder* telah menciptakan kondisi habitus baru sulit tercapai. Hal ini yang dirasa oleh aktor yang berada dalam *stakeholder* kunci yang mana memiliki beban tugas untuk melakukan pendampingan sosial terhadap KUBE agar proses pelaksanaan sesuai dengan habitus baru yang diciptakan oleh *stakeholder* utama. Modal politik dan modal simbolik yang dimiliki oleh para elit-elit di luar struktur ternyata dapat mempengaruhi siapa yang berhak menerima bantuan KUBE PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri di Kecamatan Jaten. Maka dari itu, dari pengamatan awal yang dilakukan peneliti ada beberapa KUBE di Kecamatan Jaten banyak ditemukan tidak bisa menjalankan aktivitas usahanya dan aktivitas sosialnya akibat adanya praktik *pseudo government*.

Dengan temuan awal data dalam pelaksanaan program KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten, maka peneliti akan melihat pola pemberdayaan yang dilakukan ketika adanya dominasi kuasa yang dilakukan oleh elite-elite penguasa baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Pelaksanaan pemberdayaan program KUBE PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri memiliki 6 (enam) penalaran yang menjadi kekhasan di Kecamatan Jaten dalam mengatasi pola tekanan dari praktik *pseudo government*. Adapun 6 (enam) penalaran tersebut adalah; **Pertama**, Aktor/Agen. Pada konsep ini aktor disebutkan sebagai pelaku atau agen yang menggerakkan masyarakat untuk membangun usaha ekonomi produktif sebagai penunjang berdirinya desa sejahtera mandiri. Adapun aktor dan agen sosial yang menjadi agen perubahan warga binaan PKH adalah para *stakeholder* yang terdiri dari dari kelompok warga binaan PKH dan pendamping (*stakeholder* kunci), kementerian sosial dan pemerintah

daerah (*stakeholder* utama), serta dunia usaha, lembaga sosial, dan jaringan lainnya (*stakeholder* pendukung) yang mendukung pembentukan Desa Sejahtera Mandiri. Di Kecamatan Jaten, para aktor ini saling berinteraksi satu sama lain untuk melaksanakan pemberdayaan agar tercipta kemandirian KUBE PKH yang menerima bantuan. Akan tetapi dari data awal yang diterima peneliti melalui observasi awal ternyata para aktor ini bermain dengan para elite-elite penguasa untuk mengendalikan bantuan sosial ini untuk kepentingan politisnya.

Kedua, Struktur. Model struktur yang menjadi kajian dalam penelitian ini merupakan suatu bangunan struktur sosial diantara aktor dan agen yang mendukung dalam praktik pemberdayaan sosial ekonomi warga binaan PKH dalam membentuk desa sejahtera mandiri. Bangunan struktur ini merupakan ranah dalam menjalankan praktik sosial dan ekonomi agar ada kemanfaatan dari desa sejahtera mandiri dalam menanggulangi kemiskinan. Struktur juga diartikan berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Struktur program Pemberdayaan KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten secara formal telah terbentuk bangunan yang kompleks dan berjenjang. Komplektisivitas yang berjenjang ini telah menumbuhkan praktik pemberdayaan yang bersifat *bottom up*. Akan tetapi dinamika yang terjadi di lapangan ternyata struktur bangunan berjenjang ini telah memicu dominasi praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh para penguasa di kabupaten maupun di desa.

Ketiga, Modal/Aset. Konsep ini dipahami dalam suatu kerangka kerja pendukung terbentuknya desa sejahtera

mandiri. Aset/modal juga dimaknai sebagai modal-modal yang memiliki potensi sosial dalam mendukung keberhasilan dari pembentukan desa sejahtera mandiri. Adapun aset atau modal yang dapat ditemukan di Kecamatan Jaten dalam melaksanakan pemberdayaan KUBE PKH pengembangan DSM ini diantaranya adalah aset finansial, aset budaya, aset sosial, aset simbolik dan aset politis. KUBE PKH yang terbentuk di Kecamatan Jaten rata-rata sudah memiliki 2 (dua) aset utama yaitu aset budaya dan aset sosial dan juga didukung oleh potensi daerah yang masuk dalam kawasan perindustrian. Sehingga para *stakeholder* berupaya untuk menguatkan 3 (tiga) modal lainnya agar dominasi kuasa yang dilakukan oleh para elite penguasa bisa dikurangi.

Keempat, akses. Aset-aset yang dibutuhkan untuk melangsungkan pengelolaan desa sejahtera mandiri belum tentu ada, atau meskipun ada namun belum tentu menguasai aset tersebut. Pengadaan dan penguasaan aset atau modal tersebut membutuhkan pintu masuk, jalur atau penghubung. Inilah yang disebut dengan akses. Dalam konteks pengadaan dan penguasaan aset atau modal dapat diwujudkan melalui relasi sosial, kelembagaan, dan organisasi yang dilakukan oleh aktor atau agen yang terlibat. Relasi sosial untuk membangun akses pemberdayaan KUBE PKH di Kecamatan Jaten sudah dilakukan oleh *stakeholder* utama dan kunci. Akan tetapi adanya tekanan secara terpadu dari para pemangku kepentingan menyebabkan sulitnya para *stakeholder* untuk mengembangkan jaringan relasi untuk memnguatkan modal-modal yang dimiliki KUBE PKH.

Kelima, Strategi Pemberdayaan, suatu kelompok UEP yang mengelola usahanya setelah menguasai aset atau modal melalui aksesnya dalam berelasi

sosial, selanjutnya memikirkan keberlanjutan usahanya dengan tetap menguasai dan mengelola aset atau modal tersebut. Inilah yang disebut sebagai strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan KUBE PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial di kecamatan sudah dilakukan sesuai dengan konteks bottom up dimana penentuan jenis usaha sampai pengelolaan usaha sudah diserahkan kepada anggota KUBE. Akan tetapi, strategi ini terbentur dengan adanya praktik *pseudo government* untuk kepentingan politisnya. Akibatnya ada KUBE yang bisa menjalani praktik pemberdayaan secara *bottom up* tapi ada pula yang dikendalikan oleh kepentingan penguasa.

Keenam, *Outcomes* penghidupan. Ujung dari penguasaan dan pengelolaan aset atau modal melalui bentuk UEP serta strategi pemberdayaan adalah terwujudnya desa sejahtera mandiri yang mampu memberikan pelayanan kesejahteraan asosial di masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di desanya. *Outcomes* penghidupan ini adalah akselerasi dari pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di desa terutama dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan melalui pemanfaatan aset potensi desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digolongkan dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif ini dipilih oleh peneliti karena fokus kajian dan masalah yang diteliti bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin bila data pada situasi sosial ini diperoleh dengan penelitian kuantitatif. Tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui secara mendalam proses sosial dalam pemberdayaan ekonomi produktif warga binaan PKH dalam

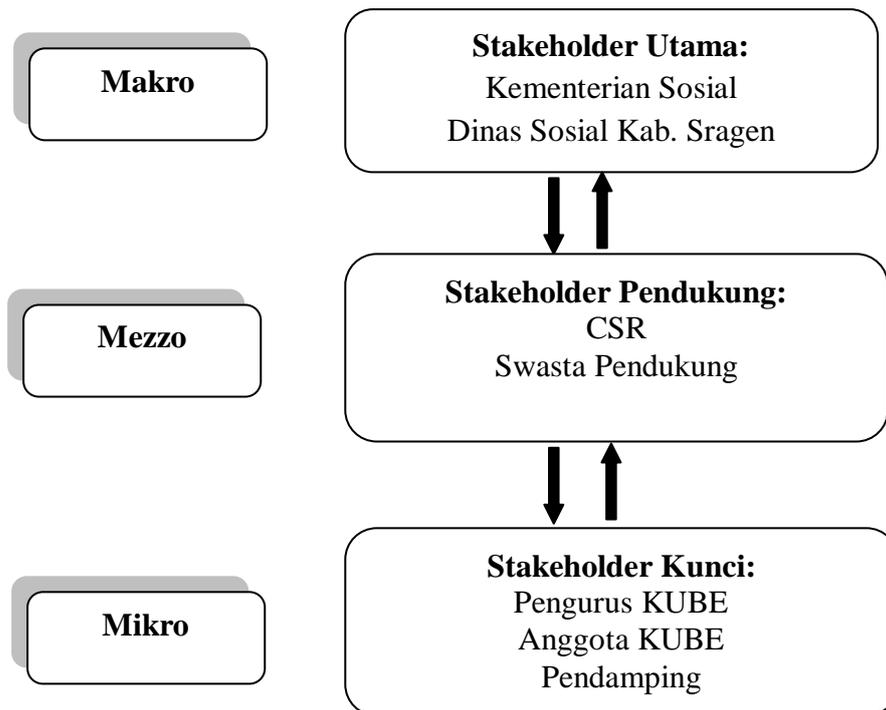
mewujudkan terbentuknya desa sejahtera mandiri. Interaksi sosial dalam wujud bangunan relasi dan jaringan sosial antara aktor pemberdayaan yaitu *stakeholder* kunci, *stakeholder* utama, dan *stakeholder* pendukung yang akan menjadi kajian analisis penelitian ini. Artinya dalam memperoleh data terkait pokok pembahasan peneliti akan memfokuskan pada proses sosial yang mendukung keberhasilan KUBE dalam membentuk desa sejahtera mandiri untuk menanggulangi kemiskinan. Disamping itu dengan menggunakan metode kualitatif akan bisa mengungkap praktik *pseudo government* pada pengguliran program KUBE PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri yang telah digulirkan di Kecamatan Jaten.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologis merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mengungkapkan tentang realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Melalui pendekatan fenomenologis, peneliti berusaha untuk memahami makna peristiwa yang menjadi pengalaman individu serta interaksi antara individu atau kelompok dalam situasi tertentu secara proposional dan akurat. Selain itu juga pendekatan fenomenologi akan membantu peneliti dalam memandang realitas sosial, fakta sosial, dan fenomena sosial sebagai dunia objektif dari bermaknaan nilai-nilai dalam kesadaran suatu individu atau kelompok masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga makna simbol-simbol dan tindakan-tindakan dari subjek yang diteliti dapat dipahami secara mendalam sesuai dengan realitas dalam masyarakat itu sendiri.

Secara khusus, penelitian menggunakan mengambil kasus mengenai praktik *pseudo government* pada pemberdayaan sosial ekonomi pada program Kelompok Usaha Bersama untuk membentuk Desa Sejahtera Mandiri yang terjadi di Kecamatan Jaten. Dalam penjarangan informasi atau data, peneliti melakukan pemilihan informan (individu) dengan teknik snowball (bergulir) untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya peneliti melakukan perbandingan bila data yang diperoleh nantinya menunjukkan kategori atau ciri yang berbeda pada individu penerima bantuan PKH dan KUBE dari Kementerian Sosial untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut. Selain itu, pihak-pihak diluar individu penerima bantuan KUBE yaitu pendamping KUBE dan pemerintah menjadi bagian lain unit analisis sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data, informasi yang menyeluruh dan relevan dengan kajian penelitian sekaligus srana *cross check* bila berhadapan dengan kenyataan ganda dilapangan.

Pada penelitian level unit analisisnya dibagi menjadi beberapa unit analisis yaitu analisis makro, analisis mezzo, dan analisis mikro. Unit analisis makro meliputi *stakeholder* utama yaitu kementerian sosial dan pemerintah daerah Kabupaten Sragen melalui dinas sosial. Unit analisis mezzo merupakan *stakeholder* pendukung dimanan terdiri dari CSR yang ada di Kecamatan Jaten dan pelaku usaha swasta yang memberikan dukungan usaha kepada KUBE. Sedangkan unit analisis mikronya adalah *stakeholder* kunci yang terdiri dari pendamping KUBE dan juga para penerima bantuan KUBE dalam hal ini pengurus dan anggota KUBE. Berikut ilustrasi dari unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

Bagan 1.
Level Unit Analisis Penelitian

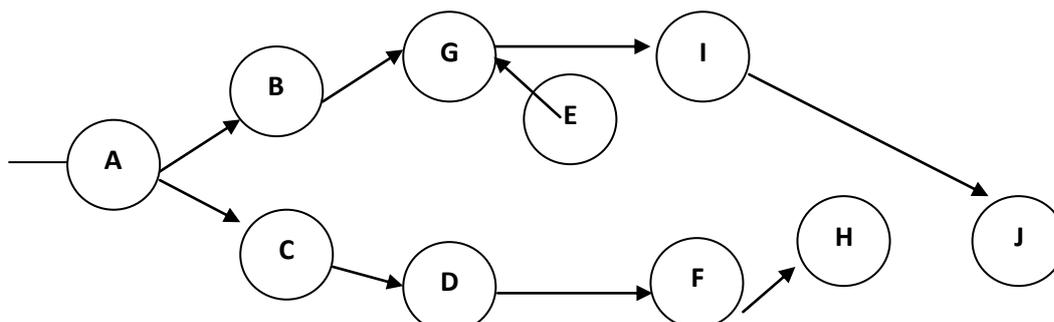


Sumber: Pemikiran Penulis

Adapun untuk pengambilan informan (unit analisis) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menggunakan teknik *snowball* karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dimana peneliti melakukan pemilihan pihak atau aktor tertentu yang dipertimbangkan dapat memberikan data penelitian. Aktor pertama yang kami tunjuk sebagai informan awal adalah supervisor pendamping kecamatan. Dari aktor pertama tersebut, peneliti mendapatkan sumber data

utama yaitu pendamping KUBE PKH dan Anggota KUBE PKH di Kecamatan Jaten. Data informasi yang diberikan oleh pendamping dan anggota KUBE PKH menjadi utama untuk dilakukan perbandingan pengecekan data kepada aktor-aktor lain yaitu *stakeholder* utama dan *stakeholder* pendukung. Setiap aktor antar *stakeholder* akan memberikan rekomendasi data selanjutnya sehingga bisa didapat data yang benar-benar valid.

Bagan 2.
Proses Pengambilan Data Informan



Sumber: Sugiyono, 2006:220

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa peneliti telah memperoleh data informasi awal dari proses observasi yaitu supervisi pendamping KUBE Kecamatan Jaten (A) sebagai sumber data pertama yang peneliti anggap memiliki pengetahuan terhadap keseluruhan objek penelitian. Dari sinilah kemudian Supervisi Pendamping KUBE Kecamatan Jaten merekomendasikan kepada informan baru yaitu pendamping KUBE (B) dan Anggota KUBE (C) yang kemudian peneliti belum memperoleh data lengkap maka peneliti menuju Kabid Pemberdayaan Kabupaten Sragen (D) dan para pelaku dunia usaha (G) berlanjut sampai informan berikutnya sehingga data yang diperlukan dapat mencukupi untuk dilakukan analisis.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jaten, Kabupaten Sragen. Di Kecamatan Jaten ada 298 keluarga sangat miskin yang menerima manfaat dari program keluarga harapan (Sumber: PLKB tahun 2015). Mereka didampingi oleh 1 orang supervisor pendamping Kecamatan yang selalu memonitoring proses jalannya pelaksanaan program keluarga harapan. Berawal dari informasi masyarakat penerima bantuan KUBE PKH bahwa di Kecamatan Jaten pengaruh elite-elite penguasa terhadap pengaliran bantuan sangat kuat. Hal ini terbukti dari penerima bantuan rata-rata adalah masyarakat yang dekat dengan elite penguasa seperti partai, kepala desa, atau pendukung salah satu anggota DPRD Kabupaten Sragen. Disamping itu pula dari informasi dari informan pertama bahwa pendamping sosial yang direkrut ternyata adalah orang-orang partai. Dengan demikian pengaruh penguasa terhadap bantuan sosial ini sangat kentara di Kecamatan Jaten termasuk bantuan KUBE PKH.

Di Kecamatan Jaten ada 53 KUBE PKH yang digulirkan oleh *stakeholder* utama dari tahun 2013 sampai tahun

2016. KUBE-KUBE tersebut telah tersebar di 8 (delapan) desa yang berada di Kecamatan Jaten. Pengaliran bantuan KUBE oleh *stakeholder* utama disesuaikan dengan potensi desa yang mendukung untuk berwirausaha. Pengaliran bantuan ini pula juga diberikan kepada desa yang memiliki potensi kemandirian dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial pula. Sehingga bantuan KUBE PKH tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi penerima manfaat.

Dari 53 KUBE yang digulirkan oleh *stakeholder* utama ada sekitar 40 KUBE yang masih berjalan sesuai dengan harapan dan sisanya yaitu 13 KUBE PKH mengalami stagnasi atau jalannya usahanya tidak berjalan baik. Dari 40 KUBE yang berjalan ada 2 KUBE yang memiliki potensi dalam mengembangkan Desa Sejahtera Mandiri yaitu KUBE Handayani dan KUBE Langgeng Sejahtera. Dua KUBE ini memiliki perkembangan usaha yang signifikan dan dibentuk oleh pendamping sosial KUBE sesuai dengan arahan pedoman yang ditentukan oleh *stakeholder* utama. Dengan demikian penelitian ini di fokuskan pada 2 KUBE ini. Disamping itu peneliti juga melakukan pendalaman data terhadap 5 KUBE lainnya yang dikategorikan berjalan biasa dan stagnan. Hal ini dikarenakan untuk dijadikan perbandingan data penelitian terhadap pola pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping sosial KUBE. Dengan demikian peneliti bisa mendapatkan data yang valid pada KUBE-KUBE tersebut.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kombinasi teknik dengan beberapa tools (alat kajian) yang lazim disebut “triangulasi” yang merupakan alat pengumpul data sekaligus untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) triangulasi data

atasumber data yaitu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data berupa data primer dari hasil wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD) maupun data sekunder berupa dokumentasi yang ada; (b) triangulasi metode yaitu penelitian yang sejenis berupa metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD; (c) triangulasi peneliti yaitu peneliti melakukan review dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang sama atau menggunakan pendekatan sama dengan kajian penelitian ini serta (d) triangulasi teori yaitu peneliti dalam membahas permasalahan yang sedang dikaji tidak menggunakan satu perspektif teori tetapi diskoneksikan dengan teori lain yang dimiliki relevansi untuk lebih memperdalam analisa data hasil penelitian ini.

Pengolahan data dimulai dengan mendiskripsikan praktik *pseudo government* pada pengaliran bantuan KUBE PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri. Penulis berprinsip membiarkan realitas berbicara apa adanya (*let's the reality say something*), yang melalui observasi, wawancara mendalam maupun studi dokumen. Penulis mencatat apa yang *key informan* ketahui, dengar, lihat, dan lakukan ketika terjadi praktik *pseudo government* yang berujung pada penguasaan bantuan sosial di Kecamatan Jaten. Peneliti juga berupaya mengungkap terjadinya praktik pemberdayaan KUBE PKH dengan strategi-strategi tertentu untuk mengatasi pengaruh negatif dari *pseudo government*. Di samping itu, hasil observasi dan studi dokumen diselaraskan dengan hasil wawancara. Data kemudian dikonstruksi sesuai dengan apa yang subyek ketahui.

Penulis kemudian merentangnya ke dalam beberapa kategorisasi, memilah-milah data berdasar substansi temuan, dan pada saat yang sama dilakukan

proses reduksi data. Penulis hanya mengambil data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis kemudian melihat kecenderungan-kecenderungan, mencari hubungan asosional antara data yang satu dengan lainnya. Pada saat inilah penulis berdialog dengan teori-teori sosiologi. Dialog dengan teori ini memerlukan waktu yang lama, karena pilihan teori yang digunakan untuk berdialog harus tepat. Selanjutnya, peneliti juga melakukan interpretasi (pemaknaan) terhadap tindakan sosial yang terjadi di Kecamatan Jaten ketika program pemberdayaan dilaksanakan.

Semua proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara siklus interaktif. Pada saat pengumpulan data, penulis sekaligus melakukan analisis. Pada waktu melakukan analisis, dan ditemukan datanya kurang, maka penulis melakukan pengumpulan data kembali. Pola demikian berlangsung terus sampai dengan penelitian dianggap selesai. Oleh karena itu, wawancara mendalam dilakukan berulang-ulang dengan tujuan memperoleh pemaknaan yang sebenarnya dari praktik *pseudo government* pemberdayaan KUBE PKH pengembangan desa sejahtera mandiri.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Daerah Penelitian

Walaupun terletak di pinggiran sebelah barat Kabupaten Sragen, Kecamatan Jaten memiliki potensi wilayah yang produktif secara geografi. Hal ini letak Kecamatan Sragen berada pada jalur barang yang menghubungkan dua Provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di samping itu Kecamatan Jaten juga secara geografi memiliki lahan-lahan yang produktif untuk pertanian maupun untuk pembangunan pabrik-pabrik. Oleh karena itu dengan letaknya yang sangat Kecamatan Jaten mulai tumbuh menjadi daerah

industri dan juga pertanian pada awal tahun 1990-an.

Pertumbuhan industri di Kecamatan Jaten semakin menjadi-jadi sehingga membuat Kecamatan Jaten menjadi kawasan industri di Kabupaten Sragen. Bangunan pabrik mulai menggeser lahan-lahan pertanian di kawasan Kecamatan Jaten. Perkembangan industri yang sangat pesat ini pula maka menarik masyarakat di sekitarnya untuk bermigrasi ke Kecamatan Jaten Kabupaten Sragen. Akibatnya, lahan pertanian mulai digeser untuk pembangunan perumahan-perumahan baik perumahan sederhana sampai perumahan yang mewah. Pertumbuhan yang mengarah pada industrialisasi juga telah memunculkan usaha-usaha niaga sehingga banyak pula para investor mulai mendirikan bangunan pertokoan baik yang bertaraf kecil sampai pada tahun 2010 berdirilah sebuah Mall Plasa Palur. Jadi secara geografis, Kecamatan Sragen mentransformasi diri dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri yang besar di Kabupaten Sragen sehingga telah dapat memberikan ide-ide penanganan kesejahteraan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa pembentukan Usaha Ekonomi Produktif.

2. Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Jaten

Penduduk Kecamatan Jaten dilihat dari data mata pencahariannya menunjukkan bahwa masyarakatnya didominasi pada pekerjaan buruh yaitu baik buruh formal (pabrik) dan buruh non formal (bangunan, tani, serabutan, dan lain-lain).

Pekerjaan kelas menengah diatas dari data tidak begitu mendominasi akan tetapi sangat merata diberbagai desa. Melihat data pekerjaan tersebut, tingkat

kesejahteraan sosial di Kecamatan Jaten bisa terbilang masuk dalam daerah yang memiliki kesajahteraan yang mencukupi. Hal ini pendapatan rata-rata dengan melihat Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Karangnyar Rp. 1.5000.000. Angka pendapatan demikian lebih dari sekedar cukup untuk membangun keluarga yang sejahtera dimana biaya hidup di Kecamatan Jaten tidak begitu tinggi.

Data kependudukan Kecamatan Jaten menunjukkan jumlah penduduk kategori miskin berjumlah 4.482 keluarga. Mereka dikategorikan pada keluarga miskin yaitu keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I. Keluarga yang masuk dalam kategori inilah mereka yang menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan Kementerian Sosial untuk mendapatkan berbagai program bantuan sosial yang digulirkan. Rata-rata dari mereka masuk dalam keluarga miskin dikarenakan keterbatasan akses pekerjaan dan juga ketidak mampuan dalam mengembangkan diri untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini sangat ironis apabila dilihat keadaan geografis Kecamatan Jaten yang berada di daerah Industri dan memiliki akses jalan provinsi yang menghubungkan dua provinsi di Pulau Jawa. Letak yang strategis inilah yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Jaten untuk mendapatkan pendapat rumah tangga yang layak serta bisa keluar dari Pra Keluarga Sejahtera atau Keluarga Sejahtera Kategori I.

3. Praktik *Pseudo Government* Dalam Pemberdayaan KUBE PKH Pengembangan DSM

a. Program KUBE PKH Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri

Program DSM yang akan digulirkan oleh pemerintah pusat Kementerian Sosial (*Stakeholder* utama) merupakan konsep bantuan sosial kepada desa-desa yang sudah memiliki KUBE-KUBE yang masuk dalam indikator mandiri. KUBE yang masuk dalam indikator mandiri merupakan KUBE yang mempunyai keberhasilan dalam mengelola usahanya sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, hasil ekonomi yang tinggi, serta memiliki jiwa sosial yang kuat untuk membantu kepada masyarakat sekitarnya. Apabila desa memiliki KUBE seperti ini maka kementerian sosial akan memberikan bantuan stimulan untuk membentuk DSM. Dalam konteks ini DSM akan menjadi suatu *field* (arena) bagi para *stakeholder* yang terlibat dalam sinergitas program bantuan sosial PKH dan KUBE. *Stakeholder* ini menjadi aktor-aktor yang akan bermain dalam arena sosial DSM ini. *Stakeholder* yang menjadi aktor dalam proses pembentukan dari DSM adalah *stakeholder* utama, *stakeholder* pendukung dan *stakeholder* kunci. Dari ketiga *stakeholder* ini *stakeholder* kuncilah yang memiliki peran yang signifikan untuk keberhasilan dari program DSM. *Stakeholder* kunci dalam aturan program DSM yang disusun oleh Kementerian Sosial adalah pendamping sosial KUBE, aparatur desa, dan pengurus serta anggota KUBE. Mereka yang akan bermain peran dalam satu arena sosial program DSM.

DSM yang digulirkan pemerintah akan menjadi arena sosial untuk melaksanakan praktik pemberdayaan terhadap KUBE-

KUBE yang akan ditunjuk oleh *stakeholder* utama. Model praktik pemberdayaan ini sangat berkaitan erat dengan konsep praktik sosial dari Pierre Bourdieu yaitu dengan rumusan (**Habitus x Modal**) + **Ranah = Praksis**. Dari rumus tersebut tampak bahwa tidak ada faktor tunggal dari tindakan sosial, karena tindakan sosial itu merupakan hasil dialektis dari arena, habitus dan modal. Dengan demikian *stakeholder* kunci akan memainkan peran yang aktif untuk mengolah dialektika sosial dalam mencapai keberhasilan pembentukan DSM. Pendamping sosial akan berupaya mempertahankan konteks habitus baru yang sudah dideposisikan oleh *stakeholder* utama dengan mengolah 4 modal yang sudah dimiliki KUBEnya dalam ranah sosial DSM.

b. Marginalisasi Peran *Stakeholder* Kunci Sebagai Alat Untuk Menjalankan Praktik *Pseudo Government*

Presepsi masyarakat bahwa bantuan yang digulirkan oleh pemerintah merupakan bagian usaha yang dilakukan oleh elite-elite pemangku kepentingan di Desa telah menjadi praktik sosial yang dipengaruhi oleh Habitus program bantuan KUBE yang lama. Kondisi demikian telah menghilangkan konteks perubahan habitus yang sedang digulirkan oleh *stakeholder* utama. Seperti yang saya utarakan di awal sub bab, bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berupaya merubah tatanan konsep bantuan sosial yang berbasiskan pemberdayaan sehingga hasilnya akan maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Perubahan ini

merupakan bagian dari perubahan habitus dalam tatanan prosedural penyaluran bantuan sosial. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa habitus selalu dibawa dan dibentuk dalam momen praktik ketika, menemui masalah dalam kehidupan, pilihan bertindak dan atau konteks dimana habitus berlangsung (Arizal Mutahir, “*Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu*”, 2011: hal 63). Perubahan habitus yang dilakukan oleh *stakeholder* ini, mendapat penentangan dari praktik *pseudo government* sehingga menimbulkan permasalahan ketika menggulirkan bantuan sosial yang menyebabkan ketidak optimalan target dari bantuan sosial yang sudah digulirkan.

Usaha perubahan habitus terhadap bantuan sosial ini telah memunculkan konsep pendampingan terhadap setiap pengguliran bantuan sosial. Salah satu perubahan juga didasarkan pada bantuan KUBE PKH ini. *Stakeholder* utama menggunakan pendamping sosial KUBE PKH sebagai pengatur dan pengawas terhadap jalannya program KUBE. Pendamping Sosial juga bertugas untuk bisa mentransformasikan perubahan KUBE untuk menjadi Desa Mandiri. Akan tetapi dengan adanya praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh elite-elite desa dalam bantuan ini maka menimbulkan konteks mempertahankan habitus lama dimana program bantuan sosial seolah-olah dikendalikan oleh elite-elite desa. Akibatnya, pendamping sosial semakin mengalami pelemahan dalam modal simboliknya dan bahkan terjadi pemarginalan terhadap mereka.

c. Praktik *Pseudo Government* pada Struktur Program Pemberdayaan KUBE PKH Pengembangan DSM

Dalam suatu program bantuan sosial yang digulirkan di masyarakat selalu menimbulkan susana praktik *pseudo government* yang dijalankan oleh para elit penguasa didalam ranah ini untuk mencari keuntungan politis. Setiap program bantuan sosial memiliki struktur yang sistematis agar pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik, terkontrol dan memiliki capaian tujuan yang maksimal. Struktur sosial dibangun oleh agen yang memiliki kapital ekonomi. Agen-agen tersebut bisa jadi pemerintah atau juga bisa berasal dari perusahaan besar yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pembentukan struktur sosial program agen pemilik kapital ekonomi melibatkan unsur-unsur yang berkaitan dengan program tersebut. Struktur ini pula yang nantinya akan menjalankan program dan akan membangun habitus pengguliran program dengan pencapaian tujuan yang maksimal.

Pembentukan unsur-unsur yang terlibat dalam program KUBE PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri, peneliti membagi proses pelaksanaan program terbagi menjadi 3 (tiga) arena sosial yang melaksanakan aktivitas pengguliran program. Ketiga arena sosial tersebut terdiri dari arena *stakeholder* utama, arena *stakeholder* pendukung, dan terakhir arena *stakeholder* kunci. Pada arena *stakeholder* utama unsur-unsur yang terlibat yaitu Kementerian Pusat, Pemerintah

Daerah Kabupaten dan Kota, dan Kementerian Lembaga (KL) terkait. Pada arena ini para unsur yang terlibat diharapkan bisa menjalankan kegiatan yang sinergis dalam menentukan kebijakan pengembangan desa sejahtera mandiri. Arena berikutnya yaitu berada pada arena *stakeholder* pendukung. Pada arena ini ada dua unsur utama yang menjalankan kemitraan dengan *stakeholder* utama maupun *stakeholder* kunci. Unsur tersebut adalah dunia usaha yang memiliki program CSR nya dan unsur lainya yang berada dalam arena *stakeholder* pendukung adalah Perguruan Tinggi. *Stakeholder* pendukung ini memiliki peran yang signifikan untuk menentukan model pemberdayaan yang relevan dengan kapital budaya maupun kapital sosial yang dimiliki oleh desa. Arena terakhir dalam pelaksanaan program KUBE PKH pengembangan DSM adalah arena *stakeholder* kunci. Pada arena ini unsur-unsur yang terlibat adalah Pemerintah Desa, Pendamping Sosial dan Pengurus maupun anggota KUBE PKH. Pada arena ini keberhasilan program untuk menjadi suatu DSM sangat menentukan.

Ketiga arena yang peneliti jelaskan diatas memiliki potensi praktik *pseudo government* yang berbeda-beda pula. praktik *pseudo government* yang terjadi pada ketiga arena itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi tujuan maupun kepentingan politisnya. Setiap arena memiliki karakteristik kapital yang berbeda serta tujuan simbolisasi kekuasaan yang berbeda pula. Menurut Piere Bourdie pada suatu arena

merupakan tempat pertarungan kapital yang sangat tinggi untuk diperebutkan. Arena juga merupakan arena pertarungan (*"The field is also field of strunggles.."* Bourdieu and Loic J.D. Wacquant, 1996, *An Innovation to reflexive Sociology*, Polity Press, Cambrodge, UK; hal 101). Mereka menempati posisi tertentu dapat mempertahankanya atau bahkan mengubah konfigurasi kekuasaan pada tatanan arena. Bagi Bourdieu, pembedaan antara strategi antar pertarungan sangat penting (Scott Lash, 2004, "Sosiologi Postmodernisme, Kanisius, Yogyakarta, hal: 263). Dengan demikian ketiga arena yang ada pada program KUBE PKH pengembangan DSM ini setiap agen memiliki posisi untuk mempertahankan habitus atau untuk merubah habitus program.

d. Habitualisasi Program Desa Sejahtera Mandiri oleh Stakeholder Utama untuk Menekan Praktik Pseudo Government

Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker seperti dikutip oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, (1964), semua kegiatan manusia tunduk kepada *habitualisasi*, yaitu proses yang menjadikan suatu perilaku menjadi kebiasaan atau biasa untuk seseorang. Oleh karena itu, habitualisasi dapat diartikan dengan pembiasaan. Ketika *habitualisasi* (kebiasaan) tersebut dianggap memiliki hal yang tinggi atau bermanfaat serta hal tersebut telah diyakini oleh banyak orang, maka proses *intitualisasi* (pelembagaan) pun terbentuk. Hbitualisasi Program KUBE PKH pengembangan Desa Sejahtera Mandiri dilakukan oleh

stakeholder utama. Hal ini dilaksanakan agar proses program bisa memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan melalui terbentuknya DSM. Proses habituasasi ini dilakukan dengan cara menggunakan pedoman pelaksanaan program dan aturan-aturan yang mengikat dari struktur program yang menjalaninya.

Habituasasi dilaksanakan secara berjenjang dari struktur-struktur yang terlibat yaitu *stakeholder* utama, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* pendukung. Proses ini dilakukan agar habituasasi yang berjalan bisa menjadi model pembiasaan program untuk bisa ditingkatkan menjadi suatu program yang melembaga. Proses habituasasi ini menjadi upaya mentransformasi habitus baru pada program KUBE yang pada awalnya KUBE merupakan bantuan instan dalam memberikan suatu usaha bagi keluarga miskin dirubah dalam habitus baru yaitu bahwa bahwa bantuan KUBE merupakan bantuan untuk memberikan modal usaha yang kesemuanya diawali dari pembentukan kelompok, penentuan usaha sendiri, dan pengelolaan dari usaha tersebut. Proses habituasasi ini yang bersifat *bottom up* menjadi perubahan pengguliran bantuan KUBE PKH agar nantinya bisa menjadi keberlanjutan usaha secara terus-menerus.

e. Strategi Perlawanan Dominasi Praktik *Pseudo Government* oleh *Stakeholder* Program

Praktik *pseudo government* yang terjadi dalam berbagai arena pada program KUBE PKH pengembangan DSM

memunculkan bentuk-bentuk strategi perlawanan untuk melawan dominasi para pelaku praktik *pseudo government*. Strategi ini digunakan baik oleh para elite atau aktor-aktor yang sedang menjalankan praktik *pseudo government* maupun para *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program. Mereka menjalankan suatu praktik *pseudo government* untuk mempertahankan habitus lama atau mentransformasi habitus baru. Para aktor diluar struktur terus berusaha untuk mempertahankan habitus lama dimana bantuan sosial dijadikan sebagai kapital ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kapital simboliknya. Dan praktik sebaliknya yang dilakukan oleh *stakeholder* utama untuk melakukan transformasi habitus dimana bantuan yang digulirkan akan sepenuhnya dalam penguasaan penerima manfaat yaitu kelompok Keluarga Miskin (KM) dan didampingi oleh pendamping sosial tanpa ada pengaruh dari kekuasaan aktor-aktor yang lainnya.

Pandangan Piere Bourdie bahwa mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mencari strategi untuk mempertahankan posisinya sedangkan mereka yang didominasi akan mencari strategi untuk memperbaiki posisinya. Strategi yang digunakan oleh agen dalam medan perjuangan untuk mempertahankan posisi, memperbaiki posisi, membedakan diri atau untuk memperoleh posisi-posisi baru. Hal ini dalam program bantuan KUBE PKH pengembangan DSM bahwa agen-agen yang menjalankan strategi mempertahankan

posisinya adalah para elit-elite desa dan juga partai politik yang berkuasa. Sedangkan mereka yang mempertahankan posisinya adalah para pendamping sosial dan juga para pemangku kepentingan lainnya yang masuk dalam struktur program di *stakeholder* utama.

Strategi dalam pandangan Bourdieu merupakan hasil yang terus berlanjut dari interaksi antara disposisi habitus dan kendala serta segala kemungkinannya. Strategi merupakan orientasi spesifik dari praktik. Strategi bukanlah semata hasil dari suatu perencanaan yang sadar dan terarah secara mekanistik. Dalam bahasa Bourdieu, strategi adalah: "*the product of the partial sense as the feel of game.*" (Pierre Bourdieu, 1990. *In Other Words. Essay Toward Reflexive Sociology*, translated by Matthew Adamson, Polity Press, Cambridge, UK, hlm: 61). Para agen-agen yang terlibat dalam Program bantuan KUBE PKH pengembangan DSM baik dari *stakeholder* utama, *stakeholder* pendukung, maupun *stakeholder* kunci memiliki strategi sendiri dalam melaksanakan disposisi habitus yang akan digunakan sebagai perubahan habitus lama.

Ada dua strategi yang terjadi dalam melawan praktik *pseudo government* yaitu strategi investasi ekonomi dan strategi simbolis. Strategi inverstasi ekonomi sangat relevan untuk melawan model ortodoxa yang sedang dijalankan oleh aktor-aktor yang berada diluar struktur program. Strategi ini justru membantu mengeluarkan KUBE dari doxa dan bisa melakukan proses heterodoxa dalm upaya

mengembangkan modal ekonomi serta memandirikan KUBE untuk bisa mengembangkan pembentukan Desa Sejahtera Mandiri. Melalui strategi investasi ekonomi KUBE-KUBE bisa berkembang sesuai dengan harapan dari *stakeholder* utama. Strategi ini akan memperkuat modal-modal lain seperti modal budaya dan modal ekonomi yang mendukung untuk memandirikan KUBE. Disamping itu strategi ekonomi juga akan memperkuat modal simbolik KUBE sehingga mereka juga tidak akan dikendalikan oleh elit-elit desa yang menginginkan bantuan KUBE ini. Sedangkan strategi simbolis ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kekuatan usaha yang sedang dikelolanya. Mereka mempertahankan model karakteristik produk yang dimilikinya untuk bisa melakukan persaingan pada tingkat pemasaran. Mereka berupaya untuk mengembangkan usaha sehingga mereka memiliki keberhasilan dalam usaha ekonomi produktifnya.

D. Kesimpulan

Proses pengguliran bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dimasyarakat menunjukkan dinamika yang mengarah pemanfaat oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan dimasyarakat. Mereka melaksanakan praktik *pseudo government* dimasyarakat untuk bisa mengendalikan bantuan sosial. Akibatnya proses pelaksanaan pengguliran bantuan tidak bisa memaksimalkan *outcome*-nya dan hanya bisa menguntungkan para aktor-aktor penguasatersebut. Seperti halnya yang terjadi pada bantuan KUBE PKH untuk pengembangan DSM di Kecamatan Jaten dinamika praktik

pseudo government juga membayangkan- bayangi diberbagai ranah program dan juga terjadi secara terstruktur sesuai dengan kepentingan politisnya. Hal terjadi karena para aktor tersebut menguasai modal- modal yang ada didalam habitus program bantuan sosial KUBE PKH.

Ada beberapa aspek modus para aktor kepentingan untuk menjalankan praktik *pseudo government* pada pengguliran bantuan sosial pemberdayaan KUBE PKH pengembangan desa sejahtera mandiri. Pertama, untuk mempertahankan modal simboliknya yang sudah dimiliki agar bisa mereproduksi modal- modal lain sehingga mereka tetap bisa menguasai ranah sosial politik di Kecamatan Jaten. Konsep pemikiran bourdieu menjelaskan bahwa aktor yang mampu menguasai modal- modal di tataran rana maka mereka akan bisa mengendalikan struktur ranah untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Aspek kedua, adalah untuk mendapatkan modal finansial dalam bentuk bantuan sosial sehingga aktor tersebut bisa memperkuat dari modal simbolik yang dimilikinya. Kedua aspek demikianlah yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh *stakeholder* program.

Pemberdayaan program bantuan sosial KUBE PKH pengembangan di Kecamatan Jaten ternyata tidak selalu tunduk saja terhadap aktor- aktor yang melakukan praktik *pseudo government* yang menginginkan penguasaan bantuan sosial yang digulirkan. Para aktor- aktor yang berada pada *stakeholder* utama dan kunci secara kolektif melakukan perlawanan untuk mempertahankan bantuan sosial agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan memandirikan desa. Proses perlawanan ini merupakan konsep heterodoxa yang terjadi pada dinamika masyarakat penerima bantuan sosial yang hanya dijadikan doxa oleh

para aktor- aktor penguasa di Kecamatan Jaten. Dengan demikian proses perlawanan kolektif ini terjadi dalam rangka penguatan modal- modal yang dimiliki oleh KUBE dan pendamping sosial KUBE.

Dalam rangka untuk memandirikan KUBE yang nantinya akan bisa mengembangkan untuk menciptakan kemandirian desa di Kecamatan Jaten maka *stakeholder* utama juga memberikan penguatan modal budaya, modal sosial, dan juga modal finansial serta modal politik dalam tataran aturan yang mengikat sehingga para pelaku pemberdayaan bisa melaksanakan pemberdayaan secara baik. Penguatan- penguatan demikian telah memproduksi modal simbolik di kalangan KUBE- KUBE penerima bantuan sosial. Dengan demikian hal inilah yang bisa dijadikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa berjalan sesuai dengan arahan pedoman yang sudah disusunnya. Sehingga praktik *pseudo government* yang dilakukan oleh aktor penguasa bisa ditekan pengaruhnya negatif pada proses pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat. Dengan demikian tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan targetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2012). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011*. Jakarta: Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
- Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. The Impact of Communication on Community Development. *J Communication*, 1(2): 101-105.
- BPS Kabupaten Sragen. (2016). *"Kecamatan Jaten Dalam Angka 2016"*. Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen.

- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline Of Theory of Practice*. Cambridge: Polity Press
- _____. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Translated by Richard Nice)*. United State Of America: Harvard College.
- Bourdieu, Pierre (1977) *Outline of a Theory of Practice*, London: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Terjemahan dari *La Distinction: Critique Sociale du Jugement* (1979), Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, Pierre (1993) *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*, New York: Columbia University Press.
- Direktorat Jaminan Sosial. (2012). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat jaminan Sosial Kementerian Sosial.
- Direktorat Penanggulangan Kemiskinan. (2014). *Laporan Riset Evaluasi Kelompok Usaha Bersama di Sukoharjo*. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2016). *Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Edi Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edy Sutrisno. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eko, Sutoro, Dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa.
- Eko, Sutoro. (2013). *Daerah Inklusif : Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: IRE.
- Field, John. (2011). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company.
- Fukuyama, F. (2005), *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: Gramedia.
- Jones, PIP, 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jasper, James M. 2010. Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?. *Sociology Compass* 4/11 (2010): pp.,965-976, 10.1111/j.9020.2010.000329.x,. New York: Graduate Center of the City University of New York.
- Kurniawan, Borni dan Mariana, Dina. *Persembahan Perempuan untuk Desa Sebuah Pendahuluan*. Yogyakarta: IRE.
- Lawang, R.M.Z. 2004. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI.
- Mariana, Dina. dan Sutoro Eko. 2012. *Memfaatkan Modal Sosial Menjadi Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Stock Take; Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. IRE Yogyakarta Bekerjasama dengan ACCESS Tahap II
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin.
- Mutahir, Arizal. 2011. *“Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu”*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nainggolan, Togiratua, dkk. (2012). *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.

- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (Terjemahan Nurhadi) (2010). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoder*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Soetomo. (2014). *“Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan Dalam Prespektif Masyarakat Lokal”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank. (2015). *Ringkasan Eksekutif: Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta: The World Bank.
- Zamroni, Sunaji, Dkk. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*. Yogyakarta: IRE.

JURNAL

- Adib , Mohammad. *“Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu”*. Biokultur Vol. I/No. 2/Juli-Desember. Universitas Airlangga Surabaya: 2012.
- Haryanti, R. *“Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama”*. Informasi Vol. 18 No. 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI: 2013.
- Krisdinanto, Nanang. *“Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”*. Kanal Vol. 2 No.2. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya: 2014.

INTERNET

- <http://www.tempo.com>, Minggu, 20 Desember 2015, diakses Kamis, 02 Oktober 2014 jam 14:25 WIB.
- <http://www.kompas.com>, Minggu, 20 Desember 2015, diakses Kamis, 02 Oktober 2014 jam 14:25 WIB
- <http://www.tnp2k.go.id>, diakses Senin, 21 Desember 2015 jam 14:25 WIB
- <http://www.kemensos.go.id>, diakses Senin, 21 Desember 2015 jam 14:25 WIB.
- <http://www.kompasiana.com/abafina/bourdieu-dan-modal-sosial>, di akses Senin, 22 Mei 2017